KONSTRUKSI PEMILUKADA YANG EFISIEN DENGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DALAM PARADIGMA DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH[i]

PAZLI
FISIP Universitas Riau

Abstrak
Tulisan ini membahas konstruksi pemilikepala daerah pada tahun 2010 dan 2011 berdasarkan kepada fenomen fenomena yang muncul dalam pemilihan kepala daerah di riau sebanyak 11 kabupaten kota. Fenomen yang muncul dalam pemilukada antara lain, mulai pada tahap persiapan memunculkan calon kepala daerah yang tidak terdapat hubungan antara calon dengan kepartaian, ketidak jujuran para penyelenggara pemilu yang cenderung berpihak kepada calon incumbent, ketidak netralan PNS,Incumben yang main kecurangan dengan mengerahkan aparatur pemerintahan dari struktur terendah, sehingga sejak tahap awal sampai terbentuknya penmerintahan rakyat yang mayoritas ternyata kepentingan terabaikan.artinya nilai nilai pembangunan, tujuan pembangunan, tujuan demokrasi dalam pesta demokrasi itu tidak pernah terwujud yaitu keadilan sosial,kesejahteraan sosia dan ekonomi l, kemakmuran dll. Sehingga penulis mengemukan beberapa hal dalam merekontruksi pemilukada yang lebih efisien pada tahap input,proses dan output sehingga tercapai dan terwujudnya tujuan pembangunan demokrasi dan otonomi daerah.
Kata Kunci: Keseimnbangan Pembangunan, Keadilan Politik.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis khususnya dalam rangka pengembangan iklim kehidupan Berbangsa yang berdemokrasi. Pembangunan demokrasi untuk memajukan kehidupan bangsa dan Negara harus mengacu kepada upaya membangun kehidupan dari beberapa indikator Pembangunan antara lain Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial. Kedua Indikator Pembangunan ini juga harus dioperasionalkan secara demokratis untuk mencapai tujuan dari National Building yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Diterbitkanya Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah menunjukkan betapa strategisnya kedudukan dan peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
Sebagaimana PP (Peraturan Pemerintah) No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhetian kepala Daerah. Tujuanya adalah agar proses politik (input, prosessing, out put) menghasilkan figur pasangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang benar-benar dapat mengemban amanah rakyat, mengembangkan Innovasi, berwawasan kedepan, serta siap melakukan pembangunan yang berorientasikan kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara multi dimensional dan berkesinambungan**.** Ringkasnya adalah: Melaksanakan Pembangunan dengan segala macam prinsip dan tujuan pembangunan.

Gambar 1. Siklus :Pemerintahan-Pembangunan Daerah-Pemilukada

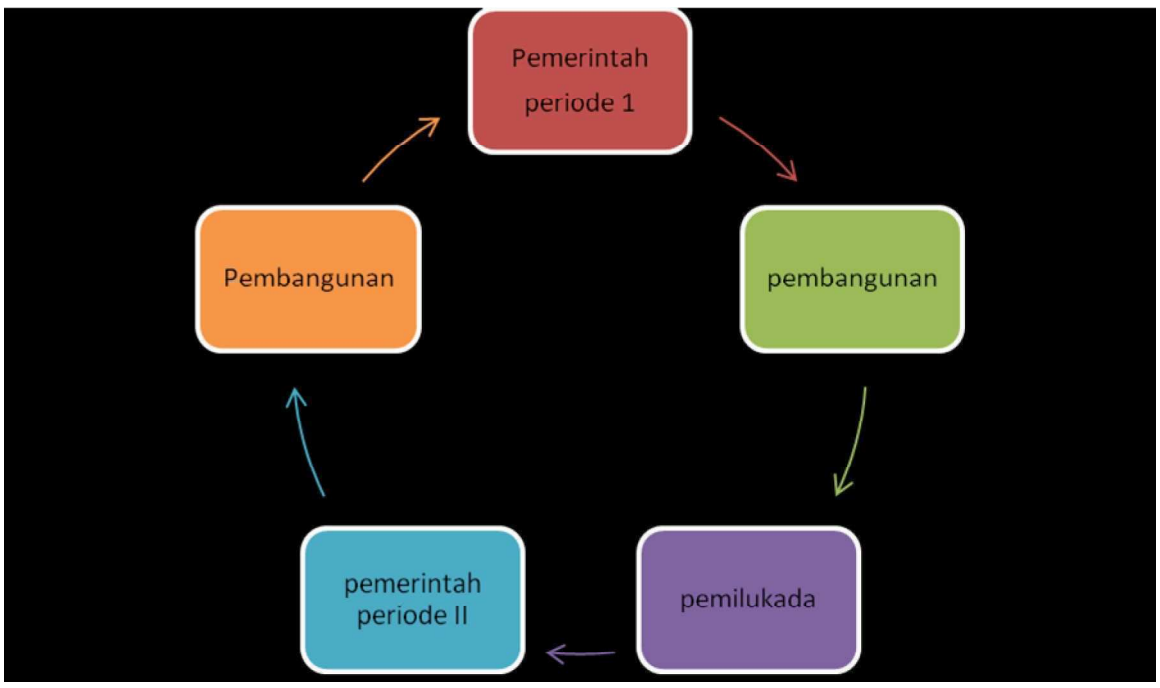

Masa Jabatan Kepala Daerah

Masa Jabatan Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten dan Kota di Indonesia adalah dua kali masa jabatan, masing masaing 5 tahun. Artinya hanya boleh 10 tahun, dsn terbagi kedalam 2 periode beturut atau tidak berturut-turut.

Dalam pemilihan kepala daerah mengedepankan Efisien dan Efektifitas sehingga formula yang di gunakan adalah :

E= O/I >1, TIDAK E =O/I<1, balance =O/I=1
E= Efektive
O= Out Put
I=Input

Segmentasi Pemilu Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah terstruktur kedalam tiga segmentasi. Segmen pertama adalah segmen Input. Di dalamnya secara subtansi mengemukakan isi demokrasi. Yang antara lain: Memuat kepentingan subjek dan kepentingan objek atau gabungan dari dua kepentingan subjek dan objek, jika disederhanakan menjadi : Kepentingan Pemerintah/Para Kandidat pemimpin/Para elit politik maupun ekonomi dan Kepentingan individu, kelompok, profesi, masyarakat secara luas.

Pada segmen input ini subjek malah banyak melakukan bahkan terpaksa berfungsi sebagai objek. dan objek adalah melakukan fungsi subjek. Namun pada giliranya yaitu pada segmen berikutnya subjek kembali menjadi subjek sesungguhnya dan objek juga kembali ke fungsi awalnya.

Gambar 2. Tiga Segmen Pemilu Kepala Daerah

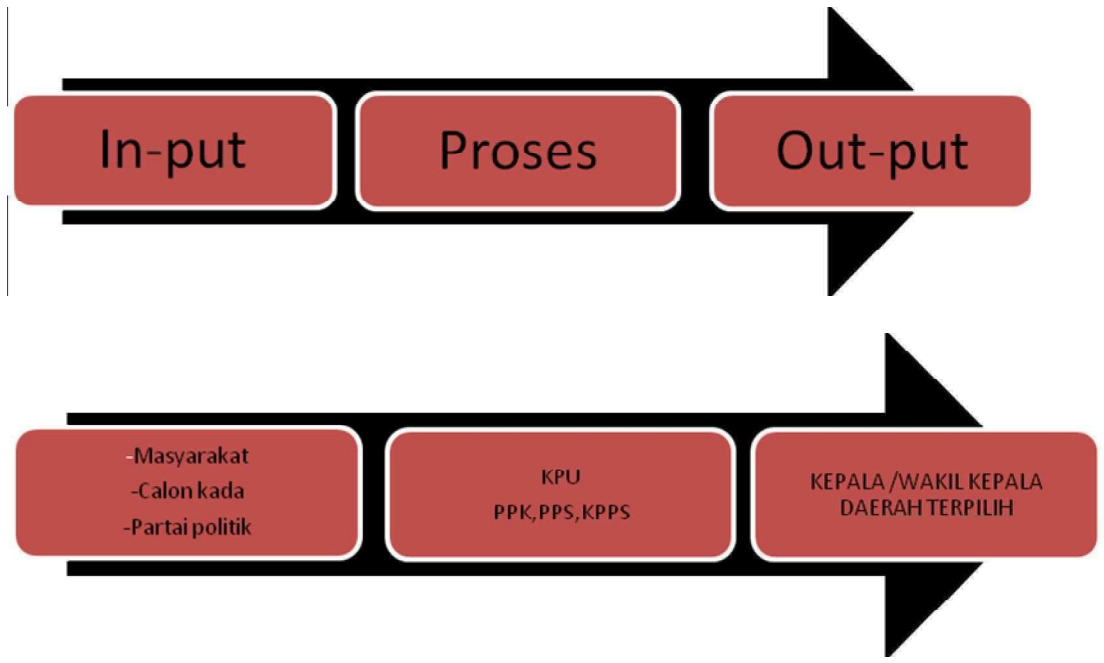

SEGMEN-IN PUT.

a. Pemilih, Masyarakat Pemilih (sbg objek).

1. Hak warga masyarakat di apresiasi sangat tinggi, bahkan hak,bermetamorfosa menjadi Kewajiban atau sebaliknya.
2. Struktur Sosial dan pelapisan sosial dan pengelompokan sosial ditengah masyarakat tiba tiba menjadi teramat penting.
3. Apapun yang berhubungan demografi diperhatikan dengan peduli.
4. Struktur Politik Pemerintahan, Kepala Dinas, Para Camat, forum Muspida, Kepala Desa, lurah, RW, RT.
5. Tokoh Masyarakat, Formal dan Informal di perhatikan dengan seksama.
6. Tim Pemenangan
7. Masyarakat terbelah pada Tataran In-Put.

b. Calon Kepala Daerah (sbg subjek).

1. Calon Kepala Daerah membumi bukan melangit. (bahasa,budaya,komunikasi, personal selling) ----cenderung manusia yang lahir atau besar, atau hidup sehari hari di wilayah tsb.
2. Calon kepala daerah harus memiliki kemampuan interaksi social bereaksi secara Kimiawi dan Fisikawi)
3. Calon memiliki hubungan ,emosional, agama, kesukuan, kedaerahan---- primordialisme
4. Calon membentuk Tim Pemenangan

c. Partai Politik.

1. Partai politik tidak konsisten mencalonkan kader partainya, berkonsekuensi kepada Karakter Building Partai selanjutnya. Karena calon terpilih dimiliki atau dicalonkan oleh banyak partai pendukung. Konsekensi selanjutnya percepatan pembangunan, khusus dalam Pengimbang Kekuasaan.
2. Fenomena ini tidak akan memunculkan partai politik yang memiliki suara permanen dalam pemilihan umum berikutnya.

3. Suara partai politik yang ada dalam pemilu tidak linear dengan kemenangan partai pendukung dalam pemilu kada sebagai indikasi bahwa parpol tidak memiliki anggota permanen karena simpatisan saja.

SEGMEN PROSESING

1. Prosesing Pemilu oleh KPUD
2. KPUD terdiri dari Pimpinan dan Anggota KPU yang non partisan dan Sekretariat KPU yang teridiri dari Pegawai daerah di kepalai Sekretaris KPU.
   Tahapan prosesing Pemilukada di KPU terdiri dari:
   1. Persiapan----penyususnan program dan anggaran Pemilu+pembentukan PPK,PPS,KPPS.
   2. Pencalonan----Pendaftaran ,Verifikasi Calon,Pengesahan Calon.
   3. Pengadaan ,pencetakan dan pendistribusian.
   4. Kampanye Pada tahapan **prosesing** pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, masyarakat dengan mudah menentukan pilihan berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala dan wakil kepala daerah. Kapabilitas serta wawasan para calon kepala daerah hendaknya akan menjadi acuan masyarakat dalam menentukan pemimpinya.
   5. Pemungutan Suara dan penghitungan Suara
   6. Penyelesaian-----MK.

SEGMEN OUT-PUT

Out-Put nya adalah terpilihnya pemimpin baru, dimana masyarakat pemilih memberikan suara yg prosentasenya memenuhi unsure ketentuan 2/3 dari yang memberikan suaranya. Kepada kepala daerah terpilih diberikan legitimasi untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemerintahan sesuai dengan undang undang yang berlaku dan diawasai masyarakt terutama masyarakat atau kekuatan yang tidak memilihnya.

Disamping itu juga kepala daerah terpilih memiliki tanggungjawab mengharmonisasikan hubungan secara vertikel berbagai kepentingan antara pemerintah daerah kabupaten kota, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat pada semua indikator bidang pembangunan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Melaksanakan Pembangunan dengan segala macam prinsip dan tujuan pembangunan Nasional.

Subtansi yang termuat dalam Pembangunan yaitu: Perobahan dan Pembaharuan, Proses yg dinamis dan berorientasi kepada upaya tanpa akhir, Proses Multidimensional.

Todaro (1978) : 3 nilai pokok keberhasilan pembangunan

- Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Basic Needs).
- Meningkatnya harga diri (self esteem) sebagai manusia
- Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom) yang merupakan salah satu dari hak azasi menusia

Berdasarkan indikator tsb, yg menjadi sasaran pemabangunan :

(1) Pembangunan harus selalu berusaha utk meningkatkan ketersediaan dan memperluas pemerataan (redistribusi) kebutuhan hdp pokok. (2) Pembangunan hrs dpt meningkatkan taraf hdp masyarakat (income, lapangan kerja, pendidikan, nilai-nilai budaya dan HAM).(3) Pembangunan hrs dpt memperluas jangkauan alternatif

ekonomi dan sosial bagi semua individu dg cara membebaskannya dari prinsip-prinsip ketergantungan

- Menurut Bryant C dan Louise (1987) pembangunan adalah " 1.Proses multidimensi yang mencakup : perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat, lembaga-lembaga nasional, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (Inequality) dan pemberantasan kemiskinan absolut . 2. Proses pembangunan merupakan perubahan sosial budaya. Ringkasnya: Diarahkan sebagai suatu proses yg bergerak atas kekuatan sendiri (Self sustaining proces)----→ sangat tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya

- Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh Seberapa banyak masyarakat mampu memanfaatkan kesempatan yg ada

Indikator Pembangunan

Hanya dua indikator pembangunan yaitu Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial. Indicator Ekonomi adalah Income Perkapita dan Pemerataan (distribusi) pendapatan.

- Indikator Sosial; UNRISD (1970) , 18 variabel utk mengukur indeks taraf pemb, NSB.

- Life expectancy
- Konsumsi Protein Hewani perkapita
- Persentase anak-anak yg belajar di SD dan SLP
- Persentase anak-anak yg belajar pada sekolah kejuruan
- 5. Jumlah Surat Kabar
- 6. Jumlah Telepon
- 7. Jumlah Radio
- 8. Jlh penduduk di kota yg mempunyai penduduk 20.000 atau lebih
- 9. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian
- 10. Persentase tenaga kerja yg bekerja pada sektor-sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- 11. Persentase pekerja yg mempunyai pekerjaan memperoleh gaji
- 12. Persentase PDB yg berasal dari industri pengolahan dan manufacture
- 13. Konsumsi energi perkapita
- 14. Konsumsi listrik per kapita
- 15. Nilai per kapita perdagangan Luar Negeri
- 16. konsumsi baja perkapita

- 17. produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian
- 18. Pendapatan per kapita produk nasional bruto
- UNDP (1990) Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
- 1. Tingkat Harapan Hidup
- 2. Tingkat Melek Huruf
- 3. Tingkat Pendapatan riil per kapita berdasarkan purchasing power
- 1. Pendidikan (tkt pendidikan, tkt melek huruf, tkt partisipasi pdd)
- 2. Kesehatan (rata-rata hr sakit, fasilitas kesehatan)
- 3. Perumahan (sumber air bersih, sanitasi, listrik, mutu rumah)
- 4. Angkatan kerja (partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan)
- BPS (1992) Indikator Susenas Inti (Campuran) : 9 Variabel;

☐ 1. Pendidikan (tkt pendidikan, tkt melek huruf, tkt partisipasi pdd)

☐ 2. Kesehatan (rata-rata hr sakit, fasilitas kesehatan)

☐ 3. Perumahan (sumber air bersih, sanitasi, listrik, mutu rumah)

☐ 4. Angkatan kerja (partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan)

☐ 5. Keluarga berencana dan fertilitas (penggunaan ASI, tingkat imunisasi, (kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi)

☐ 6. Tingkat Konsumsi per kapita

☐ 7. Kriminalitas (jumlah pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, jumlah perkosaan per tahun)

☐ 8. Perjalanan wisata (Frekwensi perjalanan wisata per tahun)

☐ 9. Akses ke media massa (jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi)

Jika 50% saja unsur-unsur yang ada dalam indikator ekonomi dan indikator sosial diatas mampu diwujudkan di daerah kepada rakyat, maka Out-Put Pemerintahan tersebut dapat dikatakan efektif dalam membangun kehidupan Demokrasi politik dan ekonomi.
Ukuran Efektif itu adalah Out Put/Input >1 dan tidak efektif jika Out Put/Input < 1 atau impas tidak ada kemajuan jika Out put/InPut =1
Namun disebahagian daerah efektifitas pembangunan ekonomi dan sosial setelah pemilu cenderung berada pada < 1 dan =1. Artinya pemilu kepala daerah yang menghasilkan kepala daerah terpilih tidak mampu mengimplementasikan demokrasi normative di tengah masyarakatnya. Dengan harapan kepala daerah itu akan memberikan implementasi demokrasi pada masa jabatan kedua lima tahun kedua. Maka selalu mengusung isu isu lanjutkan.

Kurva Pergeseran Pelaksnaan Pembangunan dan Periode Kepemimpinan
Y= pelaksanan Pembangunan
X=Periode Kekuasaan

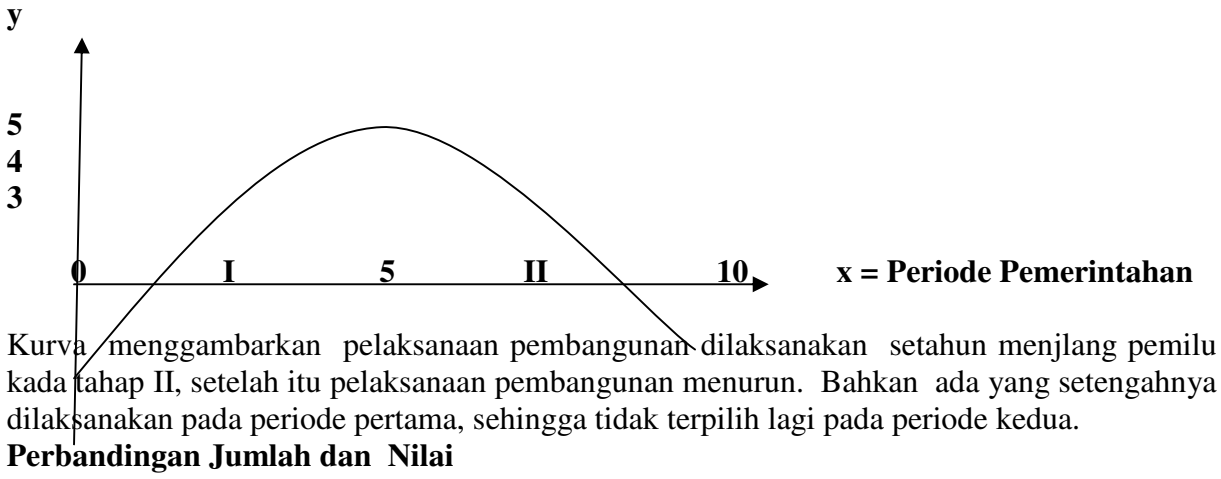

Kurva menggambarkan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan setahun menjlang pemilu kada tahap II, setelah itu pelaksanaan pembangunan menurun. Bahkan ada yang setengahnya dilaksanakan pada periode pertama, sehingga tidak terpilih lagi pada periode kedua.

Perbandingan Jumlah dan Nilai

Mari kita lihat beberapa muatan pada segmen Input dan Out put politik berikut ini,

No	Muatan In-put , Prosesing dan Out-put	Jumlah Personil/include dalam proses pemilu kada	Nilai Konversi untuk alokasi pembangunan
1	Masyarakat Pemilih	Ribuan/ratusan ribu/jutaan	=1
2	Penyelenggara (KPU,PPK,PPS,Panwas)	Ratusan Orang	1 bahkan tidak bernilai
3	Calon Kepala daerah/Kepala Daerah	2 orang/satu pasang	>1 minimal 2, cenderung banyak.

Pada masa kepemimpinan memasuki atau keinginan meraih jabatan kedua inilah kecurangan incombent sebahagian besar terjadi, mulai dari tahapan iput, proses dan output. Karena untuk mempertahankan kekuasaan.

Permasalahan pada masa ini, kenetralan PNS lebih besar dan resiko yang juga lebih besar, kenetralan Aparatur, Kadis, Camat, Kades, RW. RT, Kelompok Kepentingan,.
Unsur Muspida, Kejati, Kepolisian, Korem, Koramil,
Pelaku ekonomi di perusahaan
Penyelenggra Pemilu KPU, Panwas, PPK,PPS,KPPS, dan lain-lain.

Format Kontruksi Pemilu Kada Lebih Efisien, Efektif dan memiliki Subtansi Demokratis.

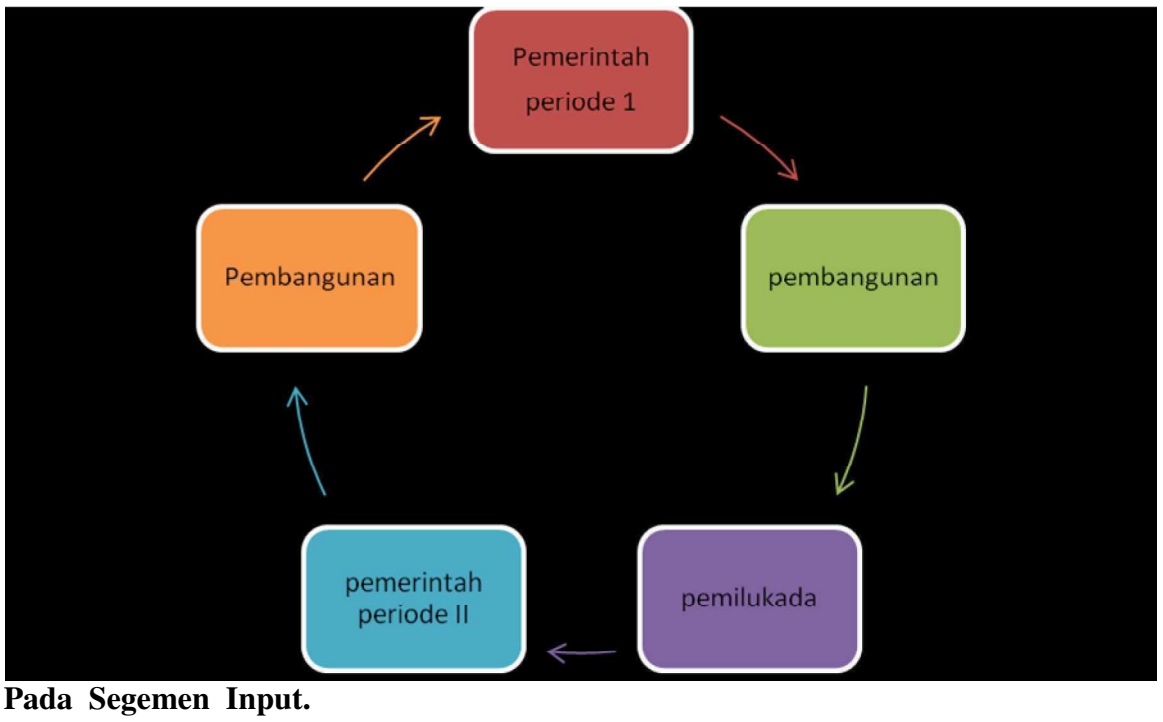

Pada Segemen Input.

Masyarakat Pemilih : Masyarakat dicerdaskan oleh Setiap Pemimpin berpegang teguh kepada UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan social. PNS tidak netral lebih banyak akibat kewenangan Pemda mengangkat Pegawai. Jadi PNS juga semaksimal mungkin Disilang, atau ditempatkan dimana saja di riau.

Para Calon: Kriteria Calon kabur dan perlu didudukan lagi.

Partai Politik; Konsisten mencalonkan Kader atau Simpstisan tetap.Partai Politik Berani mengatakan yang sah memilih adalah yang punya ID Card Partai.

Pada Segmen Prosesing: KPU di suatu daerah di Silang dg Daerah Lain di Riau. Mobile Komisi Pemilihan Umum.

Pada Segmen Out Put. Batasi Periodesasi Jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah menjadi 1 kali saja tapi masanya 7 tahun. Rencana pembangunan dirubah menjadi REPETUTA. Karena permasalahan besar muncul, Many politik, PNS, Penyelenggara Pemilu yg tidak netral muncul dominan pada transisi kekuasaan Incumben dari periode 1 ke periode II.

DAFTAR PUSTAKA

Bertalanffy Von Ludwig 1986 " General System Theory' Foundation, Development, Applications, Revised Edition, George Braziller, New York

Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. PT Gramedia . Jakarta.

Coralie Bryant & Louse G White 1987 Managemen pembangunan untuk negara berkembang, terjemahan, LP3ES , Jakarta.

Eryatno. 2003. Ilmu System; Meningkatkan mutu dan efektifitas Manageman. IPB Press. Bogor

Imam Sudiyat, (1982) Beberapa masalah pembangunan di berbagai masyarakat negara berkembang, Yogyakarta; liberty, hal 157-206. Juga hubungkan dengan AP. Parlindungan, Aneka Hukum Agraria, Bandung; Alumni,1983, Hal. 259.

Thomas R Dye. 1972 . *Understanding Public Policy.* New Jersey : Prentice Hall.

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, 2003. *Economic Development*, Eight Edition. Boston: Addison-Wesley.

Todaro, Michael P (1987). Pembangunan Ekonomi di Dunia ketika . Erlangga . Jakarta.

UNDP, 2006. *Human Development Report 2006*. New York.